

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SEMARANG

Oleh :

John L Tampubolon

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Trash problem is one of many problems faced by big cities in Indonesia, including Semarang City. The trash that increases every day can certainly bring new problems to the environment as well as with health. Therefore, the government of Semarang city issued a policy of Regional Regulation number 6 of 2012 on Trash management in Semarang city. This research will further discuss about the implementation of trash management policy in Semarang city.

The research results showed that the implementation of trash management policy implemented in two main stages, the trash reduction stages and trash management stages. In the implementation of these two stages there are several obstacles and also found things that become an inhibiting factors and supporting factors of trash management policy implementation in Semarang city. It also explained about trash management based on upstream and downstream management. The recommendation by this research are; improve the information dissemination on trash management to the community, improve and add facilities and infrastructure to support the implementation of trash management and improve the resources both from government agencies, communities and also private sector to jointly overcome the existing trash problem in Semarang city.

Keywords : Trash, Policy, Implementation

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya kota merupakan pusat sebagian besar kegiatan perekonomian, industri, perdagangan maupun pendidikan. Terpusatnya kegiatan tersebut membuat kota menjadi salah satu tujuan dari kelompok urban atau pendatang dari kota lain yang

setiap saat dapat menambah permasalahan di perkotaan.

Kota Semarang merupakan kota di Jawa Tengah yang juga termasuk memiliki masalah dengan sampah. Hal ini merupakan dampak negatif dari pesatnya pembangunan kota.

Berbagai masalah baru dapat timbul oleh dampak negatif sampah di Kota Semarang mengharuskan pemerintah Kota Semarang untuk

segera melaksanakan penanganan sampah. Salah satu dampak negatif dari tidak terkelolanya sampah dengan baik yaitu pencemaran lingkungan hidup. Berbagai jenis sampah terlihat menumpuk di sudut jalan. Kawasan dengan rob air laut menimbulkan genangan-genangan air di beberapa titik. Hal ini diperparah oleh sampah yang menumpuk tersebut ikut tergenang sehingga membuat air genangan tersebut keruh dan kotor. Masalah baru timbul dari pencemaran sampah, dimana lingkungan hidup yang tercemar tadi dapat mengganggu aspek kesehatan masyarakat. Banyak penyakit yang timbul oleh akibat pencemaran lingkungan.

Selain berdampak pada lingkungan hidup dan kesehatan, masalah sampah juga dapat mempengaruhi estetika dari suatu kota. Kota Semarang, dalam hal ini berusaha untuk membuat Kota Semarang menjadi kota yang bersih dan sehat dan juga tertata dengan rapi sesuai dengan visi dan misi Pemerintahan Kota Semarang yaitu ATLAS (Aman, Tertib, Lancar, Asri, Sehat).

Permasalahan sampah ini salah satunya juga disebabkan oleh semakin pesatnya jumlah penduduk di Kota Semarang. Volume sampah yang dihasilkan per orang untuk suatu kota besar rata-rata 0,5 kg/kapita/hari sedangkan menurut SNI 19-3964-1995, satuan timbunan sampah untuk kota besar yakni 2 - 2,5 liter/orang/hari atau sekitar 0,4 - 0,5 kg per hari (Damanhuri, 2010).

Dari pemerintah sendiri hal ini sudah menjadi persoalan yang serius dan menjadi perhatian utama. Salah satu upaya pemerintah adalah menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang

Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas mengenai permasalahan penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kota Semarang maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Semarang”**.

B. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian akan memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mendeskripsikan implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Semarang.
2. Mengetahui faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Semarang.

C. KERANGKA TEORI

C.1. KEBIJAKAN PUBLIK

Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (*public policy*) dalam literatur ilmu politik.. Sementara di sisi yang lain, pendekatan dan model yang digunakan para ahli akhirnya juga akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan.

Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan (Islamy 2004 : 15) dalam Sri Suwitri (2009 :6) memberi arti kebijakan sebagai *“a projected program of goals, values and practices”* (Suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah).

Carl J. Frederick dalam Sri Suwitri (2009 : 6) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Pengertian berikutnya dikemukakan oleh James E. Anderson dalam (Islamy 2004 : 17) dalam Sri Suwitri (2009 : 6) bahwa kebijakan itu adalah “*A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter or concern*” (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Berdasarkan definisi-definisi kebijakan publik yang dipaparkan di atas, maka kebijakan publik memiliki konsep-konsep sebagai berikut :

1. Kebijakan publik berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktik/pelaksanaannya.
2. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta.
3. Kebijakan publik tersebut menyangkut pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

C.2. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Dalam Nugroho (2004 : 158) dikatakan bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah

yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan devirat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Oleh sebab itu, tidak terlalu salah jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.

Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang sendiri dituangkan dalam Perda Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yang terdiri atas :

1. Pengurangan Sampah
Kegiatan ini kemudian dibagi menjadi tahapan :
 - a. Pembatasan Timbunan Sampah
 - b. Pendaauran Ulang
 - c. Pemanfaatan Kembali
2. Penanganan Sampah
Kegiatan ini kemudian dibagi menjadi tahapan :
 - a. Pewadahan dan/Pemilahan
 - b. Pengumpulan
 - c. Pengangkutan
 - d. Pengolahan
 - e. Pemrosesan Akhir

C.3. MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Menurut Edwards dalam Winarno (2008 : 175-203) menyatakan ada empat faktor penting yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, sebagai berikut :

1. Komunikasi
Dalam komunikasi kebijakan perlu memperhatikan tiga hal yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi.
2. Sumber daya
Sumber-sumber merupakan faktor penting dalam implementasi

kebijakan meliputi staf, informasi, wewenang dan fasilitas-fasilitas untuk melaksanakan pelayanan publik.

3. Disposisi

Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edwards, terdapat dua karakter utama birokrasi yaitu prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau disebut *standard operating procedures* (SOP) dan fragmentasi (dalam Winarno, 2008: 203).

D. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang meneliti kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Penelitian ini juga lebih mengutamakan pada proses daripada hasil. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dan memiliki makna.

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dan juga faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun pendukung penyelenggaraan implementasi Nomor

6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang.

Penelitian kualitatif tidak akan terlepas dari keberadaan instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian saat sudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan. Wawancara, dokumentasi dan observasi adalah sebagian contoh instrumen penelitian kualitatif yang menjadi senjata menggali data dari sumber-sumber informasi.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Semarang

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang mengacu pada Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Salah satu upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Semarang yakni pengelolaan sampah di hulu dan di hilir. Artinya adalah bahwa pengelolaan sampah tidak selalu harus diselesaikan di tempat pembuangan akhir sampah tetapi juga dapat dilaksanakan di asal sampah itu sendiri. Pengelolaan sampah di hulu dapat dilaksanakan oleh masyarakat maupun kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang memang konsernnya pada masalah lingkungan terutama sampah. Sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu, pengelolaan oleh KSM pada dasarnya adalah pengelolaan yang

merujuk pada pembangunan ekonomi dengan cara pemanfaatan dan pengolahan sampah menjadi barang-barang atau benda yang mempunyai nilai ekonomi yang laku di pasaran.

Pengelolaan hilir dimaksudkan untuk segala pengelolaan yang dilaksanakan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, yang mana letaknya berada di TPA Jatibarang, kecamatan Mijen. Pengelolaan hilir ini sepenuhnya berada pada wewenang pemerintah Kota Semarang. Adanya UPT (Unit Pelaksana Tugas) dari Dinas Lingkungan Hidup di TPA Jatibarang menandakan peran pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di TPA Jatibarang. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah kota Semarang di TPA Jatibarang antara lain dengan penumpukan dan pengurukan tanah (*open dumping*) dan juga dengan pengurukan tanah (*sanitary landfill*).

Disamping oleh pemerintah sendiri, pemerintah Kota Semarang juga menggandeng mitra dengan PT. Narpati sebagai pihak mitraan yang bertugas mengolah sampah/limbah organik yang sudah membusuk menjadi pupuk yang nantinya akan disalurkan kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pupuk di sekitar Semarang sesuai dengan biaya yang sudah ditetapkan bersama. Hubungan antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT.Narpati adalah berupa kemitraan.

B. PENGURANGAN SAMPAH

B.1. Pembatasan Timbunan Sampah

Pengimplementasian kegiatan pembatasan timbunan sampah di Kota Semarang masih memiliki beberapa kendala. Masyarakat kota Semarang masih belum sepenuhnya sadar akan masalah sampah di Kota Semarang. Kesadaran ini terlihat jelas di beberapa titik lokasi pembuangan sampah yang terkadang menumpuk melebihi jumlah atau melebihi batas tampung dari tempat sampah tersebut. Seperti TPS yang berada di Jl.Sriwijaya Semarang misalnya. TPS ini terkadang terlihat sampah yang menumpuk sampai berceceran di tepi jalan.

B.2. Pendaauran Ulang

Pelaksanaan kegiatan pendauran ulang juga mengalami beberapa kendala. Hal ini terlihat dari sekian banyak wilayah di Kota Semarang hanya sedikit wilayah yang mempunyai kelompok swadaya yang bekerja untuk mengurus masalah lingkungan khususnya yang berhubungan dengan sampah. Dalam pelaksanaan kegiatan pendauran ulang ini pemerintah juga berkewajiban memfasilitasi kegiatan mendaur ulang dan memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang, yang mana pada pelaksanaannya masih mengalami hambatan.

B.3. Pemanfaatan Kembali

Tahapan ini juga dimaksudkan agar timbunan sampah yang dihasilkan tidak terlalu banyak. Namun, pada kenyataan pelaksanaannya di lapangan juga masih kurang begitu baik. Beberapa hal yang menyebabkan pelaksanaan pemanfaatan kembali sampah tidak optimal antara lain keinginan atau kesadaran masyarakat yang masih rendah, tingkat kreatifitas untuk mengolah sampah menjadi barang daur ulang masih kurang serta juga disebabkan oleh faktor sampah itu

sendiri yang tidak bisa dimanfaatkan kembali.

C. PENANGANAN SAMPAH

C.1. Pewadahan dan/Pemilahan

Pewadahan yang dimaksud disini ada pengumpulan sampah yang kemudian dimasukkan ke dalam suatu wadah sampah atau tempat sampah. Pada proses pewadahan ini ada beberapa kendala yang sering ditemui yakni tindakan warga masyarakat yang suka membuang sampah tidak pada tempatnya. Tindakan ini tentu sangat merugikan dan juga membuat beban pekerjaan bertambah.

C.2. Pengumpulan

Secara keseluruhan, proses pengangkutan sampah yang ada di Kota Semarang sebenarnya masih kurang baik walaupun pelaksanaannya berjalan lancar.

C.4. Pengolahan

Proses pengolahan sampah di Kota Semarang dibagi menjadi dua (2) bagian besar yakni pengolahan di hulu (pada tingkat masyarakat/sumber sampah) dan juga pengolahan hilir (pada TPA Jatibarang). Kendala yang paling besar berasal dari pengolahan hulu dimana pengolahan ini berada pada tingkatan warga masyarakat. Beberapa pengolahan yang ada adalah oleh KSM-KSM yang ada di Kota Semarang yang mengolah sampah menjadi pupuk kompos. Disinilah kendalanya, masih banyak daerah yang belum memiliki KSM pada masing-masing wilayah. Ini dikarenakan sumber daya manusia untuk

melaksanakan kegiatan ini masih jauh dari jumlah yang diharapkan.

C.5. Pemrosesan Akhir

Pada tahapan pemrosesan akhir yang dilaksanakan pada TPA Jaribarang dinilai sudah dilakukan/diimplementasikan dengan baik. Hal ini terlihat dari pengelolaan yang baik oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh UPTD TPA Jatibarang ditambah dengan pengolahan sampah menjadi pupuk oleh rekan mitra PT.Narpati.

D. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah

D.1. Komunikasi

Dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup merujuk Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 menjadi acuan dasar dalam kegiatan pengelolaan sampah baik pengurangan maupun penanganan. Lemahnya proses transisi terkait perintah atau instruksi-instruksi, baik dari petugas Dinas kepada sesama petugas maupun oleh petugas kepada masyarakat dinilai menjadi penyebabnya. Dari keseluruhan proses tersebut, komunikasi peraturan terkait kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang dinilai masih kurang baik, walaupun memang sudah dilaksanakan pada beberapa kesempatan baik berupa sosialisasi dan juga pemberitahuan atau iklan lewat siaran radio. Namun, itu dinilai masih kurang apabila diperhatikan dari tingkat pengetahuan dan kepedulian masyarakat terkait kebijakan pengelolaan sampah apalagi jika pemberitahuan di radionya hanya kadang-kadang saja.

D.2. Sumber Daya

Sehubungan dengan sumber daya manusia, untuk pengimplementasian kebijakan serta pengelolaan sampah di Kota Semarang dinilai masih terkendala. Ada beberapa hal yang menjadi penghambat dalam SDM ini yakni antara lain jumlah petugas yang masih kurang dan juga tingkat pengetahuan serta penguasaan SDM itu sendiri. Dalam kaitannya penyelenggaraan sampah di Kota Semarang yang mana tugas dari Dinas Lingkungan Hidup adalah kegiatan pengangkutan dan pengolahan sampah. Untuk pengangkutan sampah sehari-harinya menjadi tanggungjawab dari pengangkutan sampah dan untuk seksi operasional pengelolaan sampah mempunyai tanggungjawab dalam kegiatan pengolahan sampah di Kota Semarang. Jumlah personil di Dinas Lingkungan Hidup khususnya di bagian angkutan sampah masih perlu adanya tambahan, tentu saja hal ini didasarkan pada besarnya beban kerja yang diterima oleh seksi angkutan sampah.

Disamping SDM, hal lain yang tidak kalah penting yakni sarana dan prasarana. Jumlah dan kualitas sarana prasarana pengelolaan sampah di Kota Semarang dinilai masih dari apa yang dibutuhkan dilapangan. Dalam hal pengangkutan misalnya, dibutuhkan jumlah truk pengangkut sampah yang lebih banyak lagi dan juga kualitas yang baik. Jumlah turk serta petugasnya masih kurang apabila dibandingkan dengan luasnya cakupan wilayah kota Semarang yang harus ditangani.

D.3. Disposisi

Selama ini respon dari aparat pelaksana cukup baik dan cukup

mendukung, karena ini juga merupakan kebijakan dari pemerintah Kota sehingga setiap aparat pelaksana mendukung dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penyelenggaraan pengelolaan sampah. Adanya respon yang baik dari aparat pelaksana harus disertai pula oleh pemahaman aparat pelaksana terhadap kebijakan penyelenggaraan pengelolaan sampah.

D.4. Struktur Birokrasi

Pada struktur birokrasi yang ada di Kota Semarang sudah termasuk jelas dan juga dinilai sudah kondisi baik. Koordinasi dengan sesama lembaga di kawasan pemerintahan kota Semarang dinilai sudah berjalan dengan baik termasuk juga dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pengelolaan Pasar dan juga dari SATPOL PP sebagai penindak dan penengak berlangsungnya peraturan terkait penindakan kepada pelanggar kebijakan.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan dengan metode penelitian kualitatif dan hasil analisis yang dilakukan, kesimpulan yang didapat antara lain:

A.1. Implementasi Kebijakan

Secara umum, implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah di Kota Semarang belum semua proses pengelolaannya berjalan baik sesuai dengan harapan.

Beberapa tahapan, misalnya kegiatan pembatasan timbunan sampah masih mengalami kendala. Hal ini sebagian besar dikarenakan masih banyaknya warga masyarakat yang kurang sadar akan masalah sampah ini sehingga dengan sembarang menimbun sampah di TPS-TPS atau tempat penampungan sampah yang ada. Demikian juga dengan tahapan daur ulang sampah. Pendaauran ulangan sampah ini diharapkan mampu mengurangi jumlah masukan sampah ke TPA Jatibarang dengan cara pendaauran ulang di sumber sampah yakni di lingkungan warga masyarakat.

Tahapan berikutnya yang dinilai belum terlaksana dengan maksimal yakni pada tahapan pemanfaatan kembali. Kegiatan pemanfaatan kembali sampah terkendala sebagian besar dikarenakan kurangnya sumber daya, baik tenaga ahli maupun keterampilan warga masyarakat untuk mengolah kembali atau memanfaatkan kembali sampah menjadi barang-barang daur ulang yang mempunyai nilai.

Selanjutnya tahapan pengangkutan sampah. Dengan adanya pembagian wilayah kerja dan juga pembagian tugas oleh beberapa lembaga pelaksana, baik pemerintah dan juga swasta tentunya memudahkan proses pengangkutan ini. Masalahnya masih sering dijumpai sampah TPS yang overload (pada beberapa kasus) yang membutuhkan petugas yang lebih banyak lagi. Sumber daya manusia berupa petugas pengangkutan sampah milik pemerintah (petugas harian lapangan) dinilai masih kurang apabila dibandingkan dengan luasnya wilayah yang harus dijangkau oleh petugas pengangkut. Disamping kurangnya

petugas, hal lain yang menjadi kendala utama dalam proses pengangkutan adalah sarana prasarana truk pengangkut yang juga kurang memadai, baik dari segi jumlah juga dari segi kualitas.

Kendati demikian, beberapa tahapan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang juga ada yang sudah terlaksana dengan baik diantaranya yaitu kegiatan pengumpulan dan juga kegiatan pemrosesan akhir. Kedua proses ini sudah dilaksanakan dengan baik, baik oleh warga masyarakat pada tingkat kelurahan dalam hal proses pengumpulan, karena proses pengumpulan sampah berada pada tingkatan warga masyarakat, dan juga proses pemrosesan akhir yang dilaksanakan oleh petugas dari pemerintah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagai petugas yang mengurus pengangkutan sampah di TPA Jatibarang dalam bentuk menumpukan dan juga penanganan limbah sampah sebelum dibuang kembali ke alam secara aman. Petugas lain yang mengurus pemrosesan akhir adalah dari PT.Jatibarang yang mengolah sampah (organik) menjadi produk pupuk.

A.2. Faktor-Faktor Implementasi

Faktor yang dinilai menjadi faktor pendorong pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 adalah disposisi, secara umum respon yang ditunjukkan oleh aparat pelaksana sudah cukup baik sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Faktor lain yang menjadi pendorong adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang tidak rumit dan berbelit-belit menjadikan

proses pelaksanaan kebijakan menjadi lebih mudah.

Ada beberapa faktor penghambat dalam penyelenggaraan kebijakan. Faktor komunikasi secara keseluruhan belum berjalan sebagaimana diharapkan. Saluran komunikasi atau transmisi dinilai belum baik, penyampaian kebijakan juga belum jelas serta pelaksanaannya yang dinilai belum konsisten. Ketiga hal tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap seberapa tahu warga masyarakat tentang peraturan daerah itu sendiri. Tujuan pengkomunikasian itu sebenarnya adalah agar masyarakat secara luas dapat mengetahui apa perda pengelolaan sampah serta bagaimana cara pelaksanaannya dilapangan. Namun, dikarenakan faktor komunikasi yang lemah dari petugas menyebabkan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah kurang berjalan dengan baik pada tingkat warga masyarakat.

Faktor berikutnya yang juga sangat mempengaruhi atau menghambat pengimplementasian kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang yakni sumber daya. Sumber daya yang dimaksud disini adalah sumber daya manusi juga sumber daya non- manusia, baik sarana prasarana juga informasi. Hal pertama yang menjadi hambatan adalah jumlah staf atau petugas yang masih kurang. Kurangnya jumlah petugas pelaksana kebijakan tentu berperan besar dalam kelancaran pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Logikanya adalah apabila semakin banyak orang yang mengerjakan sesuatu maka semakin cepat pula kegiatan tersebut selesai, yang pada kenyataannya jumlah staf atau petugas dinilai masih kurang banyak jika dibandingkan dengan

tugas-tugas atau pekerjaan yang harus mereka kerjakan.

B. SARAN

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan serta dari kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan terkait pengimplementasian kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang, yakni antara lain :

1. Melakukan sosialisasi secara rutin kepada pihak-pihak yang terkait pada pelaksanaan kebijakan baik kelurahan, warga masyarakat umum, serta para pelaku usaha tentang Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012
2. Melakukan penambahan jumlah staf pada Badan Dinas maupun petugas di lapangan. Penambahan jumlah staf ini juga harus memperhatikan kualitas dan kompetensi dari staf/petugas serta juga harus melakukan peningkatan kualitas staf lama yang dapat dilakukan dengan bimbingan teknis, pelatihan khusus dan sebagainya terkait pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Semarang.
3. Melakukan penambahan jumlah sarana prasarana yang dibutuhkan untuk melakukan pengelolaan sampah, termasuk penambahan jumlah armada truk pengangkut sampah, kontainer sampah di TPS-TPS serta alat-alat pendukungnya. Ini dimaksudkan agar pelaksanaan pengelolaan dilapangan tidak tersendak yang sering sekali dikarenakan sarana prasarana yang tidak mencukupi atau rusak. Usaha pemeliharaan serta peremajaan juga sangat dibutuhkan bagi TPS-TPS

yang sudah lama, juga termasuk pemeliharaan serta peremajaan TPA Jatibarang.

4. Memberikan kegiatan pelatihan untuk Kelompok Swadaya Masyarakat yang mempunyai kegiatan utama pada bidang lingkungan terkhusus pada KSM-KSM yang memang kegiatan utamanya adalah pemanfaatn kembali sampah atau pendauran ulang sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis. Disamping sebagai upaya dalam pengelolaan sampah tentu kegiatan ini juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan sampah menjadi barang dalam berbagai bentuk kreasi yang dapat dijual.

Penerbit Universitas
Diponegoro.

Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*.
Yogyakarta:Penerbit
Media Pressindo.

Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 6 Tahun 2012
tentang Pengelolaan
Sampah Kota Semarang.

Undang-undang Nomor 18 Tahun
2008 tentang
Pengelolaan Sampah

Laporan Kinerja Instansi (LKJ-IP)
Pemerintah Kota
Semarang 2015

DAFTAR PUSTAKA

Damanhuri, Eri. (2007). *Sampah Indonesia*.Bandung:
Teknik Lingkungan ITB.

Islamy, Irfan. (1994). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijksanaan Negara*.
Jakarta:Bumi Aksara.

Nugroho, Riant. (2004). *Kebijakan Publik: Formulasi,Implementasi dan Evaluasi*.
Jakarta:PT.Alex Media
Komputindo Gramedia.

Suwitri, Sri. (2009). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*.
Semarang:Badan